

BAB I
PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Akuntabilitas yang diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

LAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

B. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/23/1.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2013;
3. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem manajemen akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;

5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

D. Gambaran Umum Organisasi

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

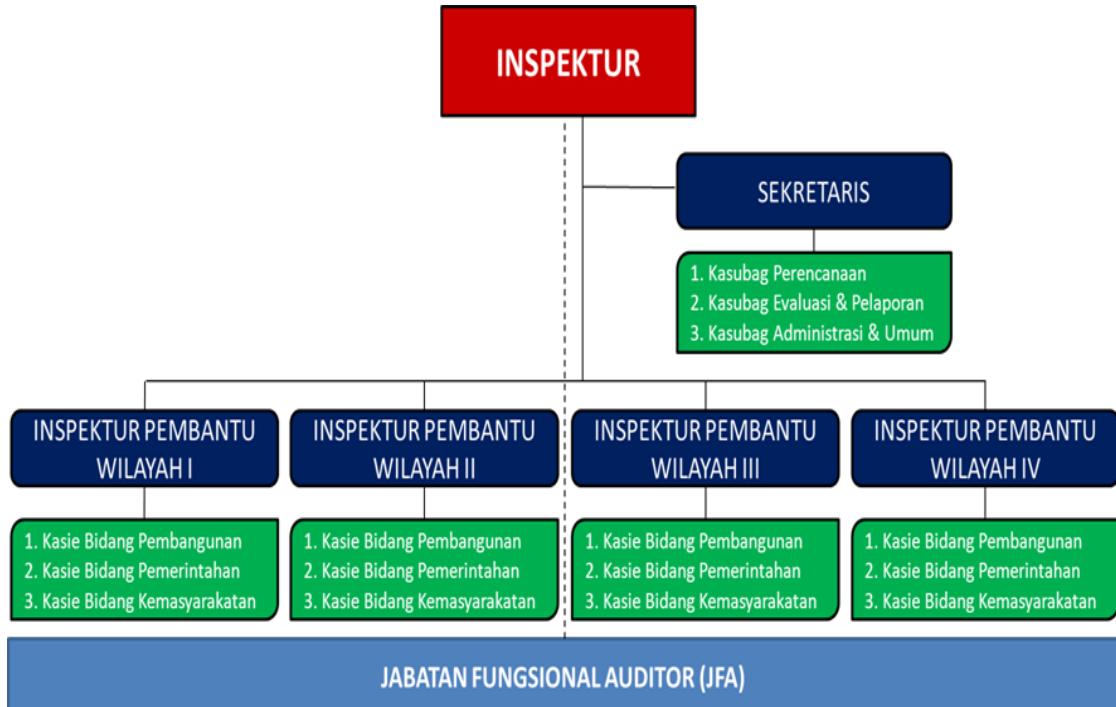
- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan daftar nama pejabatnya pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Inspektur : Drs. Kunto Nugroho HP, M.Si
2. Sekretaris : Drs. Budiharjo, MM
 - a. Sub Bagian Perencanaan : Sri Wuryanti, SH, MM
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan: Ratna Luhung T, SE, MM
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum : Budi Martono, SH. MM
3. Inspektur Pembantu Wilayah I : Drs. Suharsono, M.Si
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan : -
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan : -
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan : -
4. Inspektur Pembantu Wilayah II : Ir. Agung Suryanto
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan : -
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan : -
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan : -
5. Inspektur Pembantu Wilayah III : Ir. Agustinus Widodo, M.Si
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan : -
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan : -
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan : -
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV : Drs. Agung Priyanto
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan : -
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan : -
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan : -
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah :



E. Kondisi Strategis

1. Eksternal

Pada tahun 2013 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Perubahan kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap kebijakan manajemen akuntabilitas di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2013 merupakan tahun terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, SH dan Wakil Gubernur Drs. Heru Sudjatmoko, MM akan disusun dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang baru sesuai dengan Visi-Misi Gubernur terpilih.

Sebelum dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga

menyusun konsep dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan tetap memperhatikan keselarasan tujuan dan sasaran sebagaimana dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Di bidang pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Secara spesifik, Inspektorat mengemban tugas yang sudah ditentukan dalam Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan sebagainya.

2. Internal

a. Sistem Kelembagaan

Sebagai akibat dari pembentukan kelompok Jabatan Fungsional Khusus Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di luar jabatan fungsional khusus Auditor, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Perumus Pola Hubungan Kerja dan Pemetaan Ruang Lingkup Pemeriksaan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 800.22/157/1.3/2013 tanggal 16 Januari 2013.

b. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Perkembangan PNS Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1) Kondisi per 31 Desember 2012

Data PNS berdasarkan Jabatan :

STRUKTURAL				FUNGSIONAL		JUMLAH		
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Auditor	P2UPD	Sekretariat	Staf Teknis	
-	1	5	3	32	27	54	3	125

Data PNS Berdasarkan Golongan :

NO	GOLONGAN / PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	14	4	1	1	20
2	III	14	25	19	35	93
3	II	3	5	3	0	11
4	I	0	0	0	1	1
JUMLAH						125

Data PNS Berdasarkan Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	31
2	Sarjana S1/D-IV	74
3	Diploma/D-III	5
4	SLTA (Sederajat)	14
5	SLTP (Sederajat)	1
6	SD (Sederajad)	0
JUMLAH		125

2) Kondisi per 31 Desember 2013

Data PNS berdasarkan Jabatan :

STRUKTURAL				FUNGSIONAL		JUMLAH		
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Auditor	P2UPD	Sekretariat	Staf Teknis	
-	1	5	3	31	23	55	3	121

Data PNS Berdasarkan Golongan :

NO	GOLONGAN / PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	14	6	0	1	21
2	III	5	30	21	31	87
3	II	4	5	3	1	13
4	I	0	0	0	0	0
JUMLAH						121

Data PNS Berdasarkan Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	35
2	Sarjana S1/D-IV	68
3	Diploma/D-III	6
4	SLTA (Sederajat)	11
5	SLTP (Sederajat)	1
6	SD (Sederajad)	0
JUMLAH		121

c. Sarana dan Prasarana

1) Kondisi Per 31 Desember 2012

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	2.036	4.636.243.556
	- Alat-Alat Besar	8	176.092.000
	- Alat-Alat Angkutan	14	1.112.765.401
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.966	3.230.771.990
	- Alat-Alat Studio dan Komunikasi	44	51.082.165
	-Alat-Alat Laboratorium	2	51.222.000
3.	Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)	4	8.196.968.200
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	2.641	23.261.050
	- Buku Perpustakaan	2.638	21.141.050
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	3	2.120.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerajan	0	0
JUMLAH		4.679	12.842.162.806

2) Kondisi Per 31 Desember 2013

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	1.731	5.265.584.969
	- <i>Alat-Alat Besar</i>	6	169.042.000
	- <i>Alat-Alat Angkutan</i>	16	1.571.235.401
	- <i>Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	1.674	3.407.824.403
	- <i>Alat-Alat Studio dan Komunikasi</i>	33	66.261.165
	- <i>Alat-Alat Laboratorium</i>	2	51.222.000
3.	Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)	4	8.843.209.904
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	2.639	23.141.050
	- <i>Buku Perpustakaan</i>	2.638	21.141.050
	- <i>Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan</i>	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerajan	0	0
JUMLAH		4.374	14.131.935.923

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/220.7/1.2/2009 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, indikator sasaran, target jangka menengah dan target tahunan sebagai berikut :

VISI :

Menjadi Inspektorat yang Profesional sebagai Pendorong Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik di Jawa Tengah

MISI :

Melaksanakan Perencanaan Program Pengawasan Internal, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengawasan serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Mewujudkan SDM Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Berkualitas, Kompeten dan Profesional

Melaksanakan Pengelolaan Urusan Administrasi Perkantoran, Keuangan serta Sarana dan Prasarana

TUJUAN :

Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah melalui Pendidikan dan Pelatihan

Mewujudkan Administrasi Perkantoran, Keuangan serta Sarana dan Prasarana yang memadai

SASARAN

1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2. Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Pemerintah

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 068.2/54/2009 sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
- c. Rasio Auditor dengan Obyek Pemeriksaan

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pada Januari 2012, Inspektur Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET				
		2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Jumlah Obyek Pemeriksaan dilakukan pengawasan. 2. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan. 3. Prosentase penanganan atas aduan masyarakat.	95	95	95	95	95
2. Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Jumlah Pejabat Pengawas bersertifikat. 2. Prosentase kelulusan aparatur pengawasan yg mengikuti Diklat Teknis.	38	39	40	41	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Pemerintah	1. Prosentase administrasi perkantoran terpenuhi. 2. Jumlah kendaraan dinas/ operasional. 3. Prosentase aset terjamin perlindungan asuransi. 4. Jumlah APF yang melakukan sinkronisasi PKPT	100% 20 50% 14	100% 21 60% 14	100% 22 70% 14	100% 23 80% 14	100% 24 90% 14

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Melalui dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, ditetapkan sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TH.2013
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler/ Obyek Pemeriksaan dilakukan pengawasan. 2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti. 3. Prosentase penanganan aduan masyarakat.	95 100% 100%
2. Meningkatnya Professionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Jumlah pejabat fungsional pengawasan bersertifikat. 2. Prosentase kelulusan aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat Teknis.	100% 100%

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran belanja sebesar Rp27.310.915.000,- namun demikian Penetapan Kinerja (PK) Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 2013 masih berdasarkan DPA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp25.047.681.000. Dokumen PK dimaksud menetapkan sasaran, indikator, target, program/kegiatan dan anggaran untuk mencapai target kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal (SPI) dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan. 2. Prosentase hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti. 3. Prosentase penanganan atas aduan masyarakat. 4. Jumlah APF yang melakukan sinkronisasi PKPT	95 obrik 95% 100% 10	Program Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Kepala Daerah a. Tugas Pengawasan sesuai PKPT; b. Penanganan Kasus Pengaduan, Pemeriksaan Khusus/Strategis atas Perintah Pejabat Berwenang serta Monev; c. Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif; f. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	8.563.638.000 6.155.638.000 450.000.000 800.000.000 617.000.000 253.000.000 288.000.000
2. Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pengawasan dan Aparatur Pengawasan	1. Jumlah pejabat fungsional pengawasan bersertifikat 2. Kelulusan aparatur pengawasan yang mengikuti diklat teknis	45 100%	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan: Pelatihan Pengembangan Aparatur Pengawasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	140.000.000 140.000.000 220.000.000 220.000.000 125.320.000 125.320.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Serta Sarana dan Prasarana Pemerintah	1. Prosentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi 2. Jumlah kendaraan dinas/operasional 3. Prosentase aset yang terjamin perlindungan asuransi	100% 14 100%	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alam dan Listrik c. Jaminan Barang Milik Daerah d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU-an j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam/Luar Daerah l. Jasa Pelayanan Perkantoran	3.571.794.000 16.500.000 373.586.000 74.539.000 92.620.000 291.500.000 187.550.000 17.600.000 3.941.000 8.109.000 46.750.000 1.975.000.000 484.099.000

Terdapat beberapa catatan atas perbedaan antara dokumen-dokumen perencanaan manajemen kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada dokumen RKT Tahun 2013, target indikator sasaran jumlah pejabat fungsional pengawasan yang bersertifikat menjadi prosentase pejabat fungsional auditor bersertifikat;
- b. Pada dokumen RKT Tahun 2013, sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana pemerintah (sasaran ke-3) tidak dicantumkan karena bukan merupakan "*core-bussiness*" Inspektorat Provinsi Jawa Tengah namun pada dokumen PK Tahun 2013 dicantumkan dan selanjutnya dilaporkan sebagai sasaran kinerja lain yang menghasilkan output penting;
- c. Indikator sasaran Jumlah APF yang melakukan sinkronisasi PKPT pada dokumen Renstra Tahun 2008-2013 merupakan indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana pemerintah (sasaran ke-3) dipindahkan menjadi indikator sasaran meningkatnya Sistem Pengawasan Internal (SPI) dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan KDH (sasaran ke-1);
- d. Untuk menyesuaikan adanya perbedaan masukan dan dinamika kondisi strategis yang sudah tidak sesuai dengan yang direncanakan, dilakukan penyesuaian/koreksi terhadap angka target kinerja dalam dokumen PK Tahun 2013 sebagai berikut :
 - 1) Indikator sasaran jumlah APF yang melakukan sinkronisasi PKPT menjadi 10 APF (target dalam Renstra 2008-2013 : 14 APF);

- 2) Indikator sasaran aparat pengawasan yang bersertifikat menjadi 45 orang (target dalam Renstra 2008-2013 : 42 orang);
 - e. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 merupakan perbaikan/koreksi terhadap dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 supaya selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
 - f. Pengukuran pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan dilaporkan berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pelaporan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan. Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 100 = Amat Baik
- 80 s.d 100 = Baik
- 60 s.d 80 = Cukup
- < 60 = Kurang

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 serta perbandingannya dengan pencapaian tahun sebelumnya.

A.Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Sampai dengan akhir tahun 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013. Tingkat pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Tahun 2013		Capaian Th.2013		Capaian Th.2012		Capaian Th.2011	
		Target (3)	Realisasi (4)	(5)	(6)	(7)			
1. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan. 2. Prosentase hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. 3. Prosentase penanganan Dumas. 4. Jumlah APF yang melakukan sinkronisasi PKPT	95 95% 100% 10	95 79,30% 100% 17	100% 77,79% 100% 170%	100% 90,14% 111,11% 107,14%	100% 111,11% 153% 100%			
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis-1				111,95%	101,85%	116,03%			
2. Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Jumlah Pejabat Pengawas bersertifikat. 2. Prosentase kelulusan aparat pengawasan yang mengikuti Diklat.	45 100%	54 100%	120% 100%	143,90% 102,01%	98% 111,11%			
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis-2				110%	122,96%	104,25%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Pemerintah	1. Prosentase administrasi perkantoran tersedia. 2. Jumlah kendaraan dinas/operasional. 3. Prosentase aset terjamin asuransi.	100% 14 100%	100% 16 90%	100% 114,29% 90%	100% 82,61% 125%	100% 91% 106%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis-3		101,43%	102,54%	99%		
TOTAL RATA-RATA PENCAPAIAN SASARAN (1+2+3)		107,79%	109,12%	106,43%		

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp27.611.455.000,-

Realisasi Anggaran Tahun 2013 : Rp25.548.123.348,- (92,53%).

B.Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu:

1.Jumlah Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan

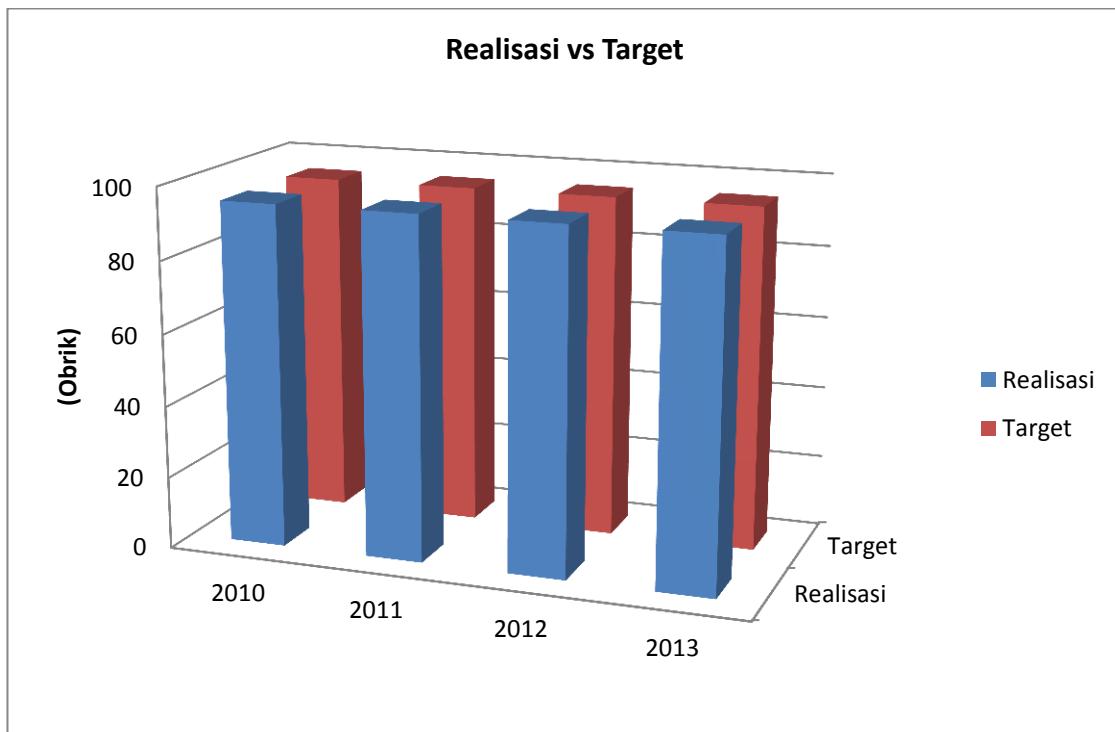
Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 35 (tiga puluh lima) Pemerintah Kabupaten/Kota dan 60 (enam puluh) satuan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan target keluaran tahun 2013 adalah 95 (sembilan puluh lima) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sedangkan target hasil (*outcome*) berupa 95 (sembilan puluh lima) Obyek Pemeriksaan telah dilakukan pengawasan.

Tahun 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan pada 95 (sembilan puluh lima) obyek pemeriksaan atau target outcome tercapai 100%, sedangkan LHP yang diterbitkan sejumlah 186 (seratus delapan puluh enam) LHP atau target output tercapai 189,47% terdiri dari :

JENIS PENGAWASAN	RENCANA			REALISASI		
	RIK	LHP	RIK	%	LHP	%
A. PKPT						
REVIU LKPD	1	1 LHR	1	100	1	100
REGULER/KOMPREHENSIF	94	94	94	100	51	54,3
-PADA SKPD PROVINSI	59	59	59	100	38	64,4
-PADA KABUPATEN/KOTA	31	31	31	100	10	32,3
-AMJ BUPATI/WALIKOTA	4	4	4	100	3	75,0
BANTUAN KEUANGAN	99	99	99	100	99	100
-BANTUAN PEM. KAB/KOTA	35	35	35	100	35	100
-BANTUAN PEM. DESA	29	29	29	100	29	100
-BANTUAN SOSIAL	35	35	35	100	35	100
B. Non - PKPT						
PEMERIKSAAN ARG	35	35	29	100	29	82,9
JUMLAH TAHUN 2013	229	229	223	100	180	80,7

Capaian target Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 untuk sasaran 1.1 **sesuai** dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan strategis (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) termasuk kategori **baik**. Sebagai perbandingan, pencapaian target tahun 2011 dan tahun 2012 juga 100% (konstan). Perbandingan terhadap pencapaian target jangka menengah sebesar 100%, sudah tercapai pada tahun 2011 dan seterusnya dapat dipertahankan sampai tahun 2013.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target kinerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 :



Dalam pencapaian target tahun 2013 hampir tidak ada kendala/hambatan. Namun demikian tingginya angka penyimpangan pencapaian target perlu dilakukan evaluasi. Penetapan target keluaran berupa jumlah LHP dan target hasil (*outcome*) berupa jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan organisasi.

Dalam pengukuran pencapaian target kinerja, didapatkan informasi kinerja bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013, terdapat 43 (empat puluh tiga) kegiatan Pemeriksaan Reguler/Komprehensif belum terbit LHP (45,7%), disebabkan oleh :

- Sejumlah 12 (dua belas) pemeriksaan bulan PKPT Desember 2013, jadwal LHP terbit direncanakan bulan Januari 2014 (*carry over*).
 - Belum selesainya proses pemeriksaan karena pembahasan Naskah Hasil Pemeriksaan antara Tim Pemeriksa dengan Obyek Pemeriksaan melewati jadwal.
- b. Realisasi Pemeriksaan ARG Tahun Anggaran 2013 (Non-PKPT) kurang dari target yang direncanakan karena dari 35 (tiga puluh lima) SKPD yang direncanakan akan dilakukan pemeriksaan, 9 (sembilan) SKPD (25,71%), tidak mempunyai Anggaran Responsif Gender (ARG).

2. Prosentase Hasil Pemeriksaan yang Ditindak Lanjuti

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dibedakan atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) eksternal yang terdiri dari BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian pada satuan kerja terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja sebagai berikut :

No	APF PEMERIKSA	JUMLAH				TINDAK LANJUT				
		LHP	TP	REK	SDH	%	BLM	%		
1.	Inspektorat Prov. Jawa Tengah	435	3.825	4.433	3.802	85,77	631	14,23		
2.	BPK-RI Perwakilan Prov Jawa Tengah	18	208	471	240	50,96	231	49,04		
3.	Itjen Kementerian	21	114	260	53	20,38	207	79,62		
		JUMLAH		474	4.147	5.164	4.095	79,30	1.069	20,70

Status tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan APF yang melaksanakan pengawasan, diuraikan sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	PKPT	JUMLAH				STATUS TL	
		LHP	TP	REK	SDH	%	BLM
1.	Pemeriksaan 2013	180	1.619	2.227	1.651	74,14	576
2.	Pending Sebelumnya	255	2.206	2.206	2.151	97,51	55
	JUMLAH TOTAL	435	3.825	4.433	3.802	85,76	631
							14,24

b. Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah

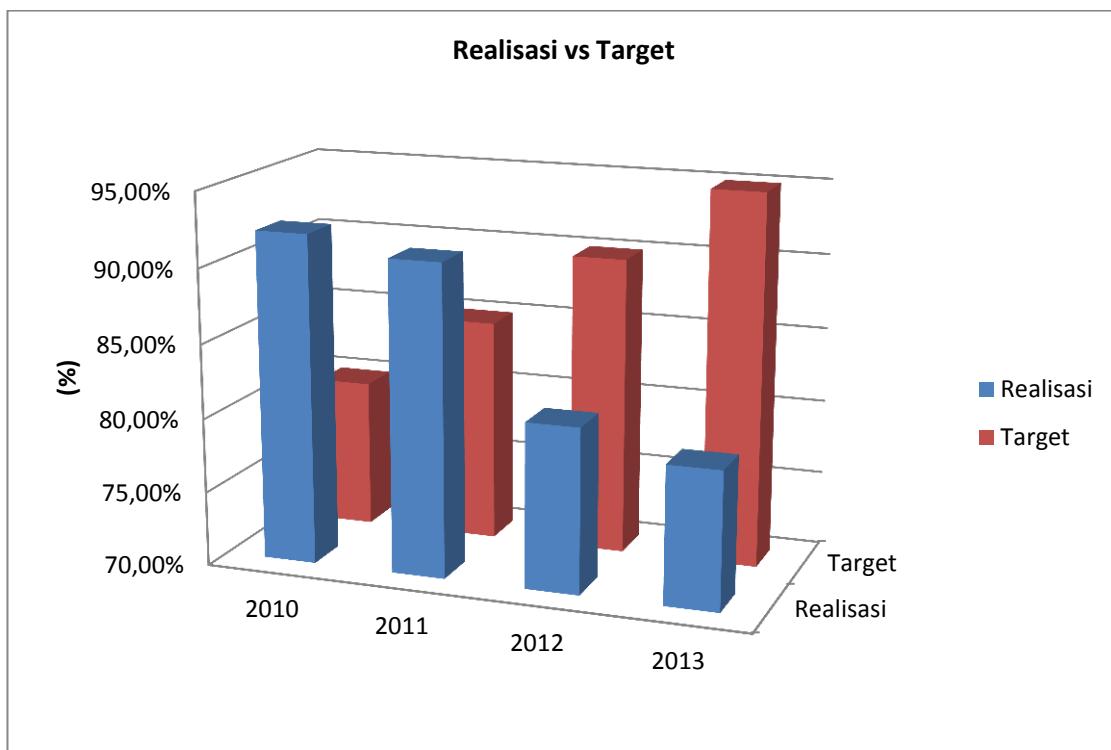
No	TAHUN PEMERIKSAAN	JUMLAH				STATUS TL	
		LHP	TP	REK	SDH	%	BLM
1.	Pemeriksaan 2013	5	66	144	29	20	115
2.	Pending Sebelumnya	13	142	327	211	65	116
	JUMLAH	18	208	471	240	51	231
							49

c. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian

No	APF PEMERIKSA (Itjen Kementerian)	JUMLAH				STATUS TL	
		LHP	TP	REK	SDH	%	BLM
1.	Kemen. Dalam Negeri	2	1	1	0	0	1
2.	Kemen. Nakertrans.	6	19	40	0	0	40
3.	Kemen. Pendidikan	1	3	3	3	100	0
4.	Kemen. Pekerjaan Umum	3	20	38	25	66	13
5.	Kemen. Koperasi UMKM	1	4	4	4	100	0
6.	Kemen. Pertanian	7	51	141	21	15	120
7.	BNPB	1	16	33	0	0	33
8.	Kemen. Perindustrian	0	0	0	0	0	0
9.	Kemen. Kehutanan	0	0	0	0	0	0
10.	Kemen. Perhubungan	0	0	0	0	0	0
11.	Kemen. Kesehatan	0	0	0	0	0	0
12.	Kemen. Sosial	0	0	0	0	0	0
13.	Kemen. Perdagangan	0	0	0	0	0	0
14.	Kemen. Pemuda dan OR	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	21	114	260	53	20	207
							80

Tahun 2013 ditargetkan prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 95%, dapat dicapai sebesar 79,30% atau 77,79% dari target. Hal ini berarti capaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 untuk sasaran 1.2 **di bawah** target yang telah ditetapkan, termasuk dalam kategori penilaian **cukup**. Dibandingkan dengan tahun 2011 dimana pencapaian sasaran kinerja terealisasi 90,98% dan pada tahun 2012 sebesar 81,13%, maka terdapat kecenderungan penurunan pencapaian prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target kinerja tahunan sampai tahun 2013 :



Pencapaian target tahun 2013 di bawah target disebabkan antara lain :

- a. LHP BPK-RI hasil pemeriksaan tahun 2013 (selain Audit atas LKPD Tahun Anggaran 2012) baru diserahkan mendekati akhir

tahun sehingga belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut namun belum dilaporkan/diadministrasikan/ dipantau oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

- b. Beberapa Pemeriksaan Itjen Kementerian Teknis yang termasuk dalam Peta Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 hanya 3 (tiga) Itjen Kementerian yang hasil pemeriksaannya dapat dipantau tindaklanjutnya.
- c. Terdapat pemeriksaan Itjen Kementerian Teknis yang tidak termasuk dalam Peta Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 atau sudah masuk namun merencanakan tidak melaksanakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Prosentase Penanganan Aduan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan

Penanganan Aduan Masyarakat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi aduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah dan aduan masyarakat yang ditujukan kepada instansi pemerintah lain (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB-RI, Sekretariat Negara-RI dan KPK) yang karena kewenangannya dilimpahkan untuk dilakukan penanganan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara-RI PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, penanganan aduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari penatausahaan (penerimaan aduan dan pencatatan), penelaahan, penyaluran kepada instansi berwenang, pembuktian aduan berkadar pengawasan (konfirmasi, klarifikasi,

penelitian, atau pemeriksaan), pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengarsipan.

Jumlah aduan masyarakat tahun 2013 yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut :

JENIS PENANGANAN	ASAL ADUAN/LIMPAHAN						TOTAL
	KPK	Setneg	Kement. PAN-RB	Kement. Dagri	Dumas	Gubernur	
Diperiksa Mandiri	0	0	0	3	4	7	
Bekerjasama dgn Kabupaten/Kota	0	6	10	1	18	35	
Ditangani APH	0	0	0	0	0	0	
Dikembalikan/Tidak dapat ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	0	6	10	4	22	42	

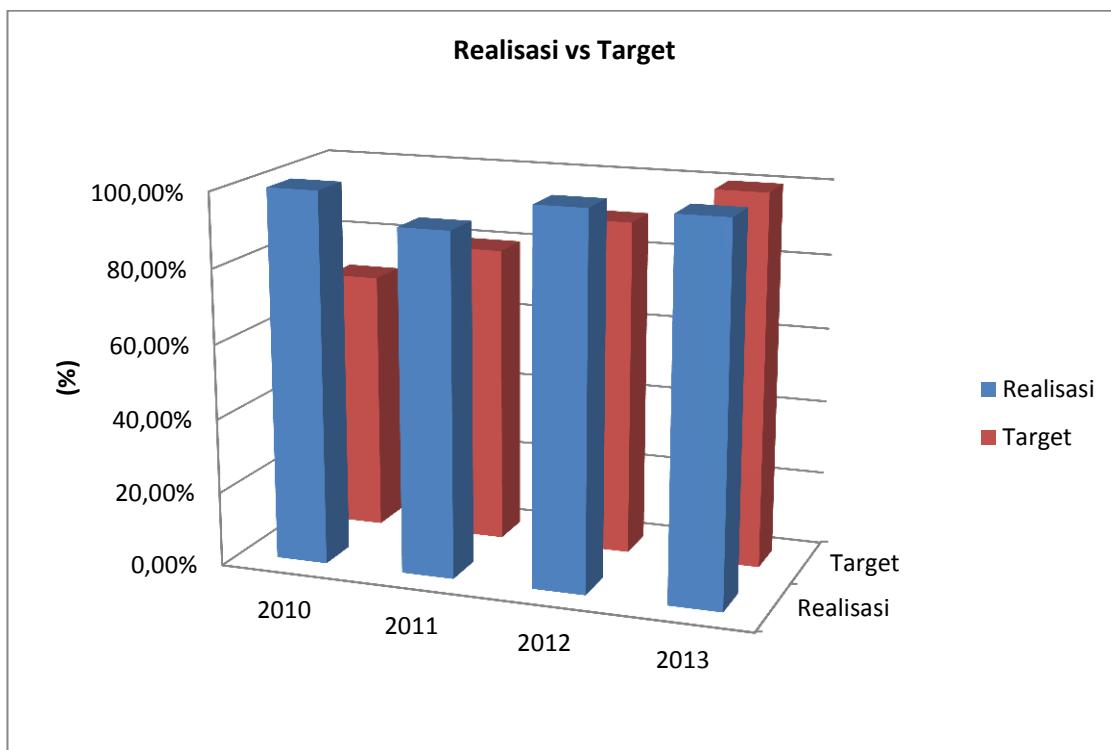
Tahun 2013 ditargetkan akan dihasilkan (*outcome*) penanganan aduan masyarakat sebesar 100%. Pada tahun 2013, Inspektorat mendapatkan 42 (empat puluh dua) aduan masyarakat dari berbagai sumber (termasuk limpahan). Seluruh aduan masyarakat yang diterima dapat dilakukan penanganan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (100%).

Dari target tahun 2013, dapat tercapai penanganan aduan masyarakat sebesar 100% dari target atau termasuk kategori penilaian **baik**. Hal ini berarti capaian kinerja untuk sasaran 1.3 **sesuai** target yang telah ditetapkan. Sebagai perbandingan penanganan pengaduan masyarakat tahun 2011 sebesar 92%, tahun 2012 tertangani sebesar 100%, dan tahun 2013 dapat dipertahankan prosentase penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%.

Hal ini sudah sesuai dengan target jangka menengah yang direncanakan akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun, bahkan

telah berhasil dicapai tahun 2012 atau terjadi percepatan 1 (satu) tahun.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target kinerja tahunan sampai dengan tahun 2013 :



4.Jumlah APF yang melakukan sinkronisasi PKPT dalam penyusunan Peta Pengawasan Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun APIP lain terkadang terjadi *overlapping* dan mengakibatkan bertubi-tubinya kegiatan pengawasan pada obyek pemeriksaan tertentu. Untuk itu diperlukan upaya *sinkronisasi* PKPT antar Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yang melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Setiap tahun Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyusun peta pengawasan Provinsi Jawa Tengah hasil sinkronisasi PKPT dengan APF lain yang melakukan kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk PKPT 2013, ditargetkan 10 APF melakukan sinkronisasi PKPT dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

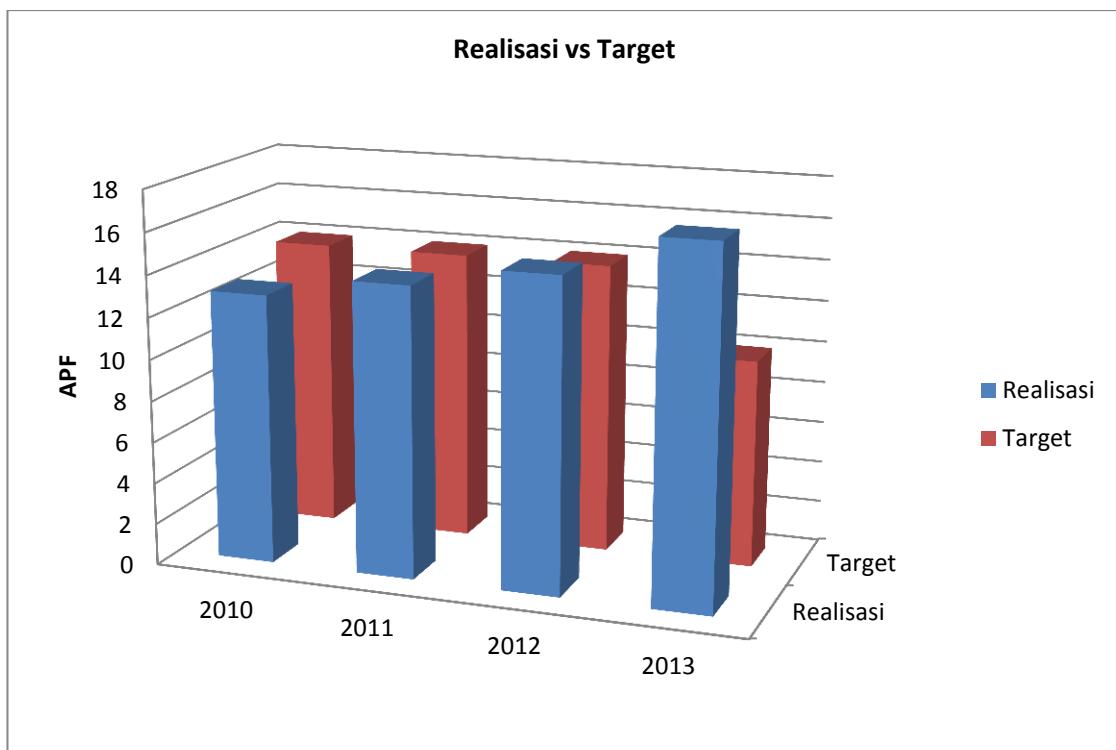
Pada tahun 2013, APF yang melakukan sinkronisasi PKPT dalam Peta Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebanyak 17 (tujuh belas) APF yaitu :

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- d. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- e. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
- f. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- h. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- i. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- j. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- l. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial;
- m. Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- n. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
- o. Inspektorat Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- p. Inspektorat Jenderal Kementerian Koperasi dan UKM;
- q. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian maka pencapaian target untuk sasaran 3.4 adalah sebesar 170% atau **melebihi** target yang telah ditetapkan

dan termasuk kategori **amat baik**. Dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, dimana 14 APF melakukan sinkronisasi PKPT, capaian tahun 2013 sebanyak 17 APF yang melakukan sinkronisasi mengalami penambahan 3 (tiga) APF yang berhasil dilakukan sinkronisasi PKPT dalam rangka penyusunan Peta Pengawasan Provinsi Jawa Tengah.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target kinerja tahunan sampai dengan tahun 2013 :



Sasaran 2 : Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1.Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan Bersertifikat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 068.2/54/2009, Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah Rasio Auditor terhadap Obyek

Pemeriksaan. Sampai dengan selesai dihitungnya analisis beban kerja dan analisis jabatan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan indikator lain untuk mengakomodir IKU yang telah ditetapkan, yaitu jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan Bersertifikat.

Sehubungan dengan pembentukan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menghitung juga jumlah P2UPD yang telah diangkat termasuk dalam pengukuran capaian untuk indikator jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat.

Pada akhir tahun 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki aparatur pengawasan sejumlah 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari auditor bersertifikat dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebagai berikut :

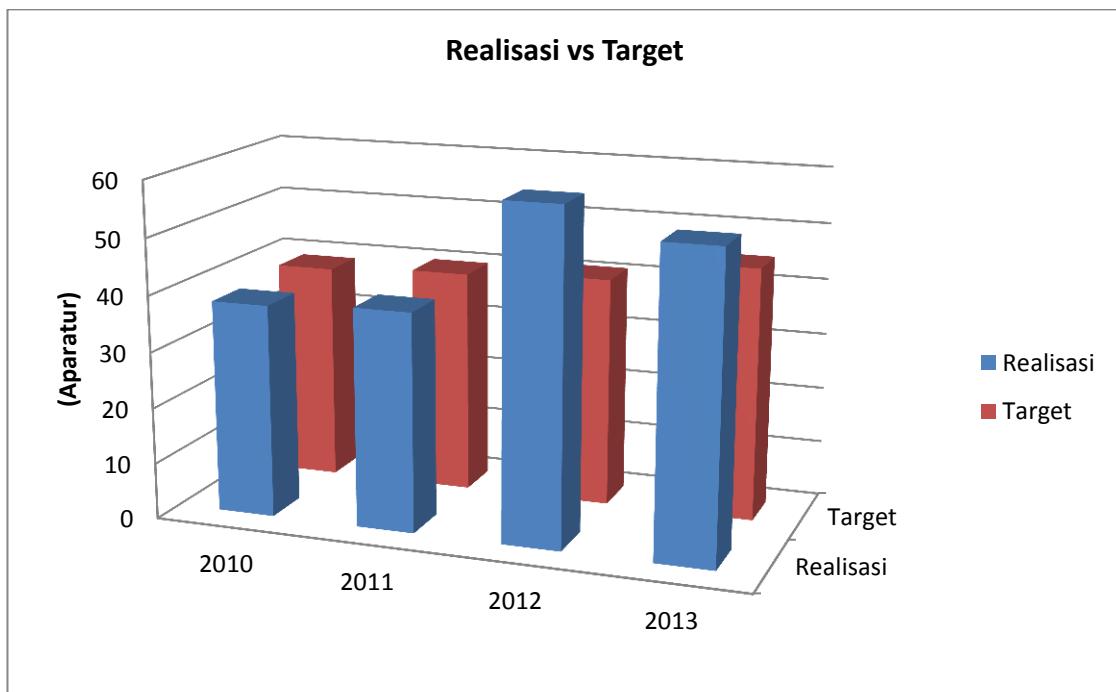
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Auditor	Ahli Madya 12
		Ahli Muda 16
		Ahli Pertama 3
2	P2UPD	Ahli Madya 7
		Ahli Muda 12
		Ahli Pertama 4
JUMLAH		54

Target tahun 2013 jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan bersertifikat sebanyak 45 orang. Tahun 2013 Inspektorat Provinsi telah mempunyai 54 (lima puluh empat) aparatur pengawasan bersertifikat atau 120% dari target atau kategori **amat baik**. Hal ini berarti capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 untuk sasaran 2.1 **melebihi** target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun 2011 dimana jumlah aparat pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bersertifikat masih sejumlah 39 orang, tahun 2012 sejumlah 59 orang, maka jumlah aparat pengawasan bersertifikat tahun 2013 sejumlah 54 orang berarti mengalami penurunan 5 orang (8,47%) dibandingkan tahun 2012. Namun demikian, dibandingkan dengan target jangka menengah 2008-2013, maka pencapaian target jangka menengah sudah tercapai sejak tahun 2012 atau terjadi percepatan pencapaian target 2 tahun.

Tingginya pencapaian target disebabkan pada Tahun 2012 terdapat kebijakan "*inpassing*" Jabatan Fungsional Khusus (JFK) Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) untuk 27 PNS Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target kinerja tahunan sampai dengan tahun 2013:



Terjadinya penurunan jumlah aparat pengawasan bersertifikat disebabkan oleh :

- a. Aparat pengawasan bersertifikat sudah memasuki masa purna tugas,
- b. Pengangkatan aparat pengawasan bersertifikat menjadi pejabat struktural eselon.

Sebagai alternatif pemecahan masalah, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengusulkan perpanjangan batas usia pensiun (purna tugas) bagi pejabat fungsional Auditor Ahli Madya, sudah disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian sejumlah 3 (tiga) orang yaitu a.n. Drs. R. Daru Praptomo, Chailan Nusa, SH dan Dra. Siti Sukarti.
- b. Melakukan penambahan staf teknis untuk diperbantukan (magang) dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- c. Mengirimkan peserta diklat keahlian fungsional bidang pengawasan baik untuk pembentukan maupun penjenjang (Auditor dan P2UPD).
- d. Mengusulkan pengangkatan PNS yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Fungsional Khusus Auditor.

2. Prosentase kelulusan aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat (Pendidikan/Pelatihan) Teknis.

Pengukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PESERTA	LULUS
1.	Bimbingan Teknis (BIMTEK)	40	40 100%
2.	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	40	40 100%
3.	Pengiriman Peserta Mengikuti Diklat/Bimtek/dll	77	77 100%
	TOTAL	157	157 100%

Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS	PESERTA	LULUS
1.	Bimbingan Teknis Perpres No.70 Tahun 2012	40	40 100%
	TOTAL	40	40 100%

Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai berikut :

NO	KEG. PELATIHAN KANTOR SENDIRI	PESERTA	LULUS
1.	PKS Perpajakan	40	40 100%
	TOTAL	40	40 100%

Sedangkan 46 (empat puluh enam) kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2013 yang diikuti oleh PNS Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO (1)	NAMA KEGIATAN (2)	PESERTA (3)	LULUS (4) (5)
1.	Bimtek Reviu LKPD	10	10 100%
2.	Diklat TOT JF P2UPD	1	1 100%
3.	Seminar Nasional 2013	1	1 100%
4.	Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah Th.2013	2	2 100%
5.	Diklat Teknis Akuntansi Pemerintah & Laporan Keuangan	1	1 100%
6.	Sosialisasi Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)	1	1 100%
7.	Workshop Peningkatan Kapasitas Fasilitator PMPRB Pemerintah Daerah	2	2 100%
8.	Workshop Peningkatan Kapasitas APN	1	1 100%
9.	Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu	2	2 100%
10.	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1 100%
11.	Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	1	1 100%
12.	Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	1	1 100%
13.	Workshop Mekanisme Tata Kelola Perjalanan Dinas bagi aparatur Pusat/Daerah	1	1 100%
14.	Asistensi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Regional I	1	1 100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Workshop PPPRG SDM Regional Barat	1	1	100%
16.	Sosialisasi Permendagri No.84 Th 2012	3	3	100%
17.	Pelatihan SIPKD	2	2	100%
18.	Bimtek Aksi PPK Daerah th 2013	2	2	100%
19.	Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi antara Auditor dan Penegak Hukum	2	2	100%
20.	Lokakarya Pra Pelingkupan	1	1	100%
21.	Seminar Nasional	1	1	100%
22.	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terkait Pengawasan Pelayanan Publik dan Budaya	1	1	100%
23.	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	3	3	100%
24.	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pemda (LSP Pemda)	1	1	100%
25.	Seminar&Workshop Pelingkupan KLHS Penyusunan RPJMD	1	1	100%
26.	Rakor Progman Bapertarum PNS	1	1	100%
27.	Evaluasi Penempatan JFU	2	2	100%
28.	TOT PPRG	1	1	100%
29.	Workshop Implementasi SIPKD	1	1	100%
30.	Bimtek Evaluasi Jabatan	1	1	100%
31.	Kursus Keuangan Daerah	1	1	100%
32.	Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Pertama	4	4	100%
33.	Ujian Barang dan Jasa	5	5	100%
34.	Fasilitasi Pembinaan Transmas th.2013	1	1	100%
35.	Penyusunan Per-UU dalam rangka revisi Perda No2/2004	1	1	100%
36.	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Perkantoran	1	1	100%
37.	Workshop Peningkatan Kapasitas Penyelenggara negara	1	1	100%
38.	Lokakarya Analisis Baseline data dan Pengkajian Pengaruh KRP	1	1	100%
39.	Diklat Teknis Renstra dan AKIP Th 2013	1	1	100%
40.	Kegiatan Penguatan Penghayatan ideologi panchasila	1	1	100%
41.	Diklat Sanggah, Penanganan Permasalahan Hukum & Whistleblowing	1	1	100%
42.	Peninjau Gelar Budaya Kerja dalam konvensi mini gugus kendali mutu	2	2	100%
43.	Finalisasi draft pedoman audit PPRG	1	1	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	100%
45.	Workshop peran pemerintah dalam antisipasi Tindak Pidana Korupsi	1	1	100%
46.	Bimtek Nasional Barang/Aset Milik Daerah/Negara	4	4	100%
	TOTAL	157	157	100%

Berdasarkan DPA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, target keluaran (*output*) untuk pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan serta workshop adalah 50 orang dapat tercapai sebesar 157 orang (314%) untuk 46 kegiatan.

Sementara untuk target hasil (*outcome*) persentase kelulusan aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat Teknis tahun 2013 ditetapkan sebesar 100%. Pada tahun 2013 persentase kelulusan sebesar 100%, atau capaian target Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 untuk sasaran 2.2 **sesuai** target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori penilaian **baik**. Dibandingkan dengan tahun 2011 dimana 100% peserta diklat lulus dan tahun 2012 sebesar 96,91%, telah terjadi kenaikan tingkat kelulusan peserta diklat pada tahun 2013 sebesar 3,09%.

Dalam pengukuran pencapaian target untuk indikator sasaran ini terdapat hambatan/kendala yaitu pengumuman kelulusan peserta ujian sertifikasi pembentukan dan penjenjangan Auditor serta diklat keahlian lain (misal Pengadaan Barang/Jasa) tidak dapat diketahui secara langsung, kadangkala pengumuman kelulusan melewati tahun ujian.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target kinerja tahunan sampai tahun 2013 :



Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Pemerintah

Pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga dilakukan terhadap beberapa keluaran (output) lain yang dipandang penting untuk dilaporkan karena tercantum sebagai sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2008-2013 dengan indikator sebagai berikut :

1. Prosentase penyediaan administrasi perkantoran terpenuhi

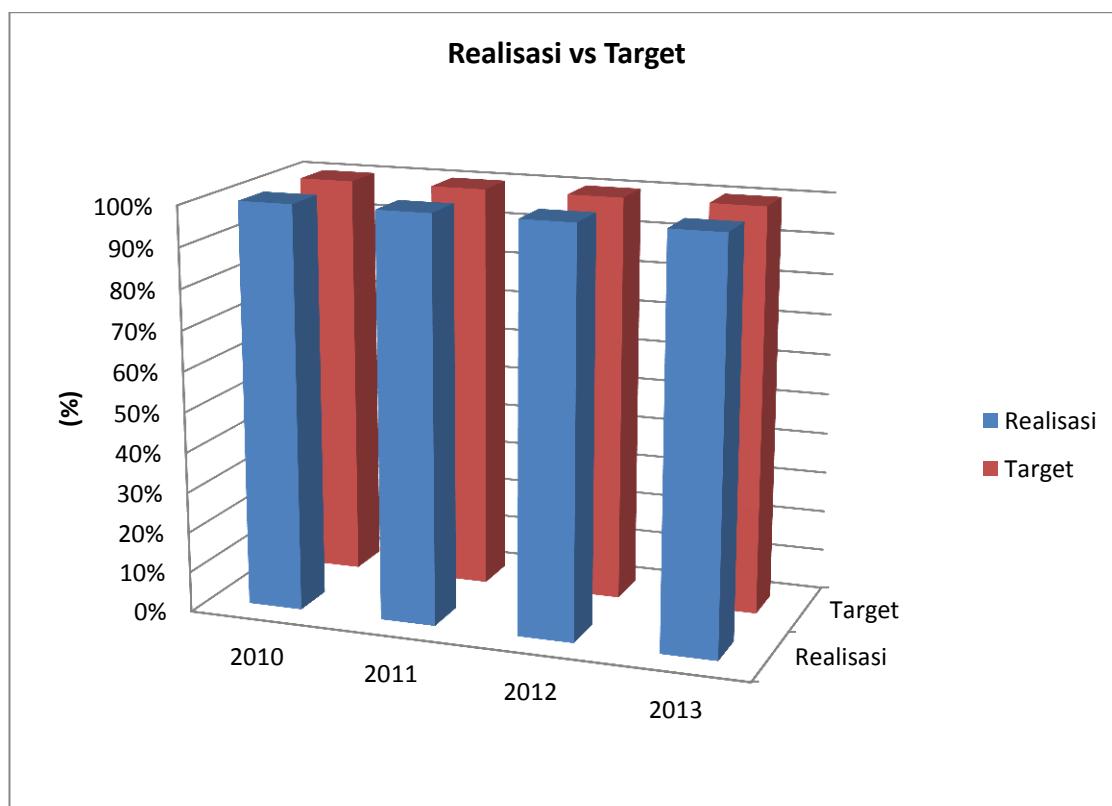
Penyediaan administrasi perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 meliputi sebagai berikut :

KEB. ADMINISTRASI PERKANTORAN (1)	TARGET (2)	REALISASI (3)	(4)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Korespondensi Dinas)	4600 surat	4600 surat	100%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	100%

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas	1 gedung	1 gedung	100%
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	100%
5. Penyediaan Barang Cetak/Penggandaan	1 tahun	1 tahun	100%
6. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan	1 tahun	1 tahun	100%
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
a. Tabung Pemadam Kebakaran	16 unit	16 unit	100%
b. Tabung Gas (LPG)	12 unit	12 unit	100%
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	10 judul/bulan	10 judul/bulan	100%
10. Penyediaan Jamuan Makan-Minum Rapat Dinas	1 tahun	1 tahun	100%
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Lain	1 tahun	1 tahun	100%
Rata-Rata Capaian Indikator			100%

Capaian rata-rata tahun 2013 untuk sasaran 3.1 sebesar 100% atau **sesuai** dengan yang ditargetkan. Sebagai perbandingan, capaian target pada tahun 2011 dan 2012 juga 100%, maka capaian tahun 2013 ini konstan (tidak terjadi perkembangan).

Berikut grafik perkembangan pencapaian target tahunan :



2. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Pada tahun 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditargetkan mempunyai 14 (empat belas) unit kendaraan dinas/operasional. Sampai dengan akhir tahun 2013, kendaraan dinas/operasional Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berjumlah 16 (enam belas) unit, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KENDARAAN	KEPEMILIKAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda 4	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	11
2.	Kendaraan Roda 2	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	5
	JUMLAH	16	

Hal ini berarti capaian target Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 untuk sasaran 3.2 dapat tercapai 114,29% dari target atau **melebihi** target yang telah ditetapkan dan termasuk kategori penilaian **amat baik**.

Dibandingkan dengan tahun 2011 dimana jumlah kendaraan dinas/operasional Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah 21 (dua puluh satu) unit dan tahun 2012 sejumlah 14 (empat belas) unit, pada tahun 2013 terjadi penambahan jumlah kendaraan dinas/operasional sejumlah 2 (dua) unit. Penambahan unit kendaraan dinas/operasional Inspektorat berupa kendaraan roda empat. Pembandingan dengan target jangka menengah 2008-2013 (24 unit kendaraan dinas/ operasional), maka pencapaian tahun 2013 masih kurang 8 (delapan) unit kendaraan dinas/operasional (33,33%). Namun demikian di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih terdapat 1 (satu) unit kendaraan dinas/operasional dengan status pinjam pakai dari program STAR-SDP berupa kendaraan roda empat yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

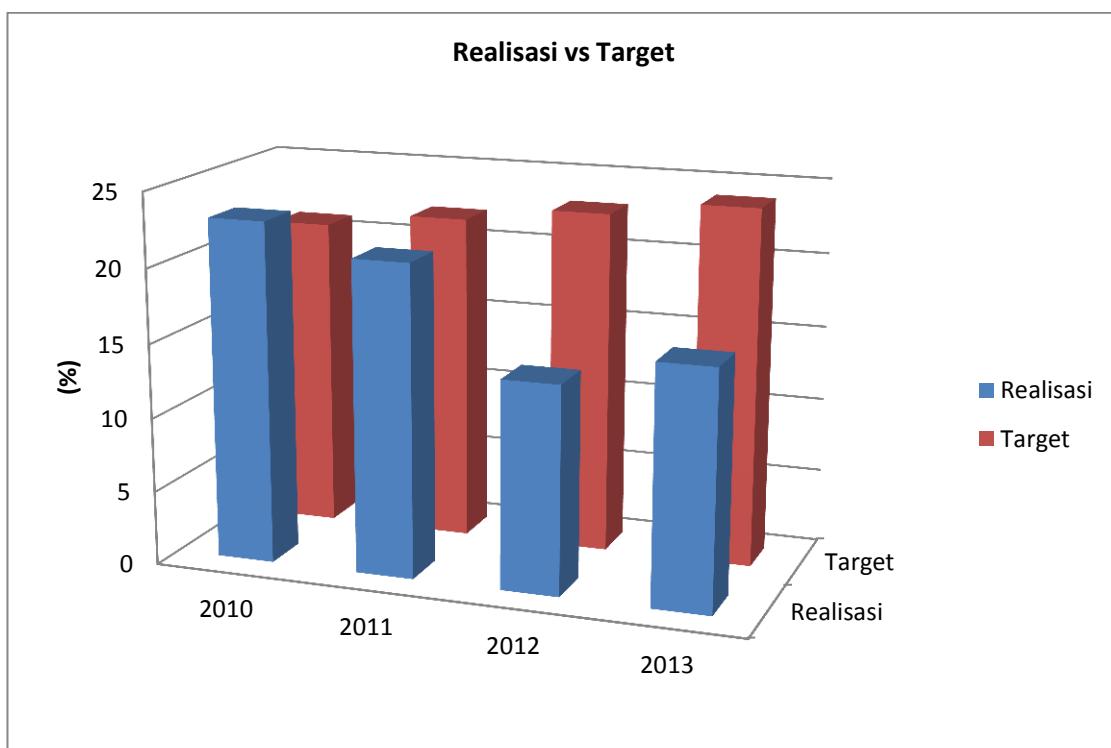
Kurangnya pencapaian target jangka menengah dalam dokumen Renstra 2008-2013 disebabkan adanya hambatan/kendala sebagai berikut :

- Adanya kebijakan penghentian semua kegiatan sewa pakai untuk kendaraan dinas/operasional di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penataan dan konsolidasi data aset/barang milik daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Belanja modal TA. 2013 untuk penambahan kendaraan dinas/operasional hanya tersedia untuk 2 (dua) kendaraan roda empat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut antara lain :

- Memberdayakan 1 (satu) unit kendaraan pinjam pakai dari STAR-SDP untuk operasional;
- Memberdayakan kendaraan pribadi dengan penggantian biaya transport perjalanan dinas “at cost” untuk penggunaan BBM.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target tahunan :



3. Jumlah Aset yang Terjamin Dalam Perlindungan Asuransi

Aset total Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 tercatat sejumlah 4.374 unit senilai Rp14.131.935.923,- namun aset yang dapat dijaminkan dalam perlindungan asuransi terbatas pada aset yang berupa alat-alat angkutan (kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2) dan bangunan gedung kantor beserta isinya yang terdiri dari 16 (enam belas) alat-alat angkutan dan 4 (empat) unit bangunan gedung/kantor.

Target keluaran (output) tahun 2013 adalah premi asuransi untuk 1 (satu) unit gedung dan perlengkapannya, 9 (sembilan) unit kendaraan roda empat dan 5 (lima) unit kendaraan roda dua. Target keluaran (output) tahun 2013 seluruhnya tercapai 100%.

Hasil pengukuran pencapaian target hasil (outcome) tahun 2013 yang direncanakan 100% aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terlindungi dalam jaminan asuransi, hanya dapat direalisasikan sebesar 90% **di bawah** target yang telah ditetapkan namun masih termasuk dalam kategori penilaian **baik**.

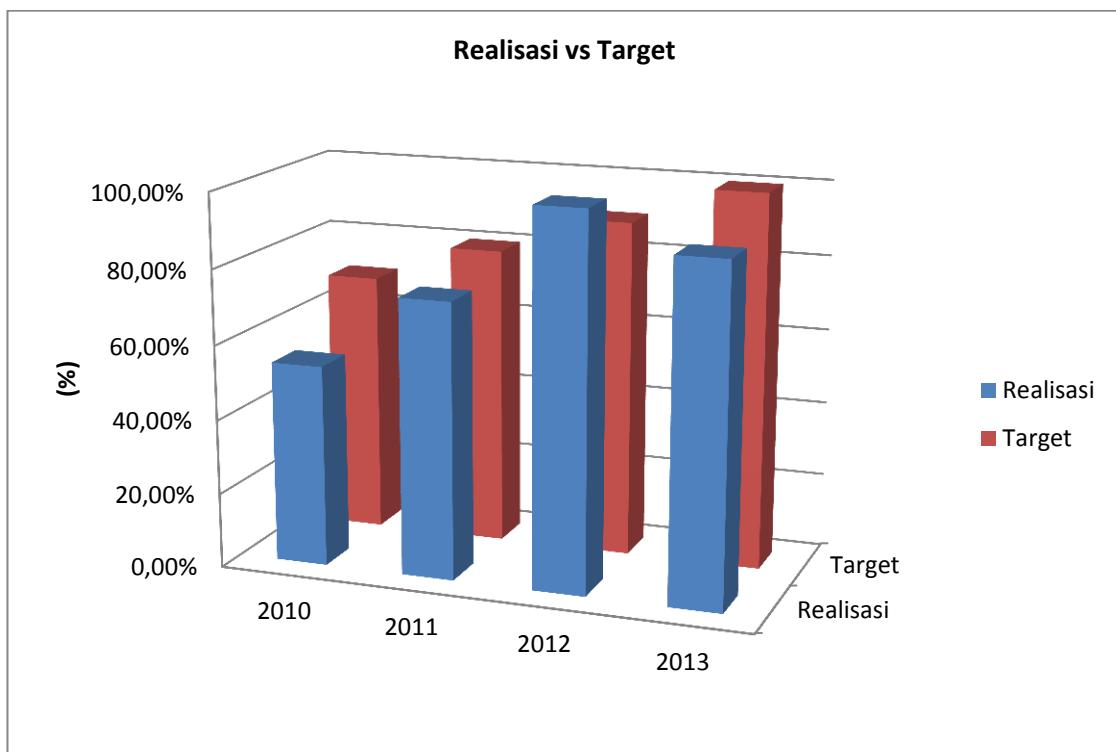
Pencapaian tahun 2013 di bawah target disebabkan pengadaan 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional roda empat menambah jumlah aset milik daerah yang dikuasai namun belum dilindungi dengan asuransi karena :

- a. Pengadaan dilaksanakan pada triwulan IV (akhir tahun anggaran),
- b. Belanja pengadaan barang dibiayai melalui DPA-Perubahan TA.2013 namun belanja untuk jaminan asuransi tidak termasuk dalam DPA-Perubahan.

Dibandingkan dengan tahun 2011 dimana aset terjamin dalam perlindungan asuransi hanya sebesar 70% dan tahun 2012

mencapai 100%, pencapaian tahun 2013 mengalami penurunan tingkat capaian sebesar 10%.

Berikut grafik perkembangan pencapaian target kinerja tahunan sampai tahun 2013 :



C.Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2013 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, semula dalam DPA mendapatkan anggaran sebesar **Rp25.047.681.000,-** (Belanja Langsung senilai Rp15.127.480.000,-) dan melalui DPA perubahan sebesar **Rp27.611.455.000,-** (Belanja Langsung senilai Rp17.265.832.000,-). Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi anggaran tersebut terserap sebanyak **Rp25.548.123.348,-** atau **(92,53%)**, sehingga terdapat efisiensi sejumlah **Rp2.063.331.652,-** atau **(7,47%)**. Angka efisiensi terbesar disumbangkan dari alokasi Belanja Langsung sebesar **Rp1.206.631.792,- (6,99%)**.

Sebagai perbandingan, efisiensi penggunaan anggaran tahun anggaran 2011 sebesar **Rp812.009.312,-** atau **(3,84%)** dan tahun anggaran 2012 sebesar **Rp425.177.500,-** atau **(1,95%)**, maka realisasi anggaran belanja tahun 2013 mengalami peningkatan efisiensi sebesar **5,52%**.

Akuntabilitas kinerja keuangan untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal (SPI) dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Untuk pencapaian sasaran ini, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.263.638.000,- untuk membiayai 6 (enam) kegiatan dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah. Rata-rata capaian sasaran 1 sebesar 111,95%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp9.142.850.000,- (89,08%).

Dengan menghitung jumlah input yang diproses menjadi output, dapat dihitung bahwa telah dilakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar :

$$\begin{aligned} &= ((100\% / 100\%) - (89,08\% / 111,95\%)) \times 100\% \\ &= (1 - 0,80) \times 100\% = 0,2 \times 100\% \\ &= 20\%. \end{aligned}$$

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Untuk pencapaian sasaran ini, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp360.000.000,- namun direalisasikan sebesar Rp339.696.000,- (94,36%). Rata-rata

pengukuran pencapaian sasaran 2 sebesar 110%, maka efisiensi anggaran sebesar :

$$\begin{aligned} &= ((100\% / 100\%) - (94,36\% / 110\%)) \times 100\% \\ &= (1 - 0,86) \times 100\% = 0,14 \times 100\% \\ &= 14\%. \end{aligned}$$

3.Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana.

Untuk pencapaian sasaran ini, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.817.414.000,- untuk membiayai 21 kegiatan pada 3 (tiga) Program. Rata-rata capaian sasaran 3 sebesar 101,43%, sedangkan rata-rata penyerapan anggaran sebesar Rp6.643.570.000,- (97,45%).

Dengan menghitung jumlah input yang diproses menjadi output, maka efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar :

$$\begin{aligned} &= ((100\% / 100\%) - (97,45\% / 101,43\%)) \times 100\% \\ &= (1 - 0,96) \times 100\% = 0,04 \times 100\% \\ &= 4\%. \end{aligned}$$

BAB IV
PENUTUP**A.KESIMPULAN**

1. Pada tahun 2013, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah **berhasil** dalam menerapkan manajemen kinerja, semua target kinerja indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori **Amat Baik (>100%)**.
2. Hasil Pengukuran Rata-Rata Pencapaian seluruh Sasaran Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar **107,79%**.
3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah sebesar (**111,95%**).
4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (sebesar **110%**).
5. Rata-rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Pemerintah" (**101,43%**).
6. Tingkat efisiensi total penggunaan anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaian target kinerja tahun 2013 sebesar **7,47%**.
7. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar dicapai untuk sasaran "Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah" sebesar **20%**.

8. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran "Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan" sebesar **14%**.
9. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Pemerintah" sebesar **4%**.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam penerapan manajemen kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 antara lain :

1. Banyaknya tambahan tugas baru untuk Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai akibat dari kebijakan/program nasional yang harus ditindaklanjuti tidak sebanding dengan penambahan masukan (*input*) yang diperlukan (SDM, anggaran, teknologi, dan lain-lain);
2. Anggaran yang tersedia tidak selalu dapat mencukupi kebutuhan untuk membiayai program/kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian target kinerja;
3. Kekurang selarasnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dengan dokumen perencanaan strategis lain yang dipedoman (Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013);
4. Kekurang selarasnya antar dokumen-dokumen perencanaan program/kegiatan (Renja), dokumen penganggaran (DPA/DPA Perubahan), dan dokumen manajemen kinerja (RKT/PK);

C.Strategi Penyelesaian Masalah

Strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Membentuk tim/panitia kerja lintas sektor untuk melaksanakan tambahan tugas baru agar tidak mengganggu tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target kinerja utama.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terkait pencapaian target kinerja serta mengupayakan penambahan alokasi anggaran belanja melalui APBD Perubahan.
3. Dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mengacu pada dokumen RKT, namun juga menyesuaikan dengan dokumen Renja-SKPD dan DPA-SKPD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 disusun sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.